



**BNNP ACEH**

# **RENCANA KERJA (RENJA)**

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH  
TAHUN 2022**



**BNNP ACEH**

**RENCANA KERJA (RENJA)  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH  
TAHUN 2022**

**I. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
9. Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024.

## **II. VISI BNN PROVINSI ACEH**

“Menjadi Perwakilan BNN Di Provinsi Aceh yang Profesional dan Mampu menyatukan dan menggerakkan Seluruh Komponen Masyarakat, Instansi Pemerintah dan Swasta dalam Melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika, psikotropika Prekursor dan Bahan Adektif Lainnya”

## **III. MISI BNN PROVINSI ACEH**

“Menyatukan dan menggerakkan segenap potensi masyarakat dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Aceh”.

## **IV. TUJUAN BNNP ACEH**

Peningkatan penanganan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Provinsi Aceh.

## **V. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL**

Sasaran pembangunan nasional dalam aspek penanganan permasalahan narkoba difokuskan pada penguatan upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba dengan indikator keberhasilan sasaran berupa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Adapun arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah dengan mengintensifkan upaya sosialisasi bahaya narkoba dan upaya rehabilitasi korban penyalahguna narkoba (*demand side*) serta meningkatkan efektifitas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (*supply side*). Sementara strategi pembangunan yang akan ditempuh adalah melalui pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di daerah; diseminasi informasi bahaya narkoba secara masif di berbagai media; penguatan lembaga terapi dan rehabilitasi milik instansi pemerintah ataupun masyarakat; pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahguna dan/atau pecandu narkoba secara terpadu; serta penguatan kegiatan intelijen narkoba.

## VI. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL

### ***Arah Kebijakan***

Dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional penanganan permasalahan narkoba 2020-2024 dan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis kelembagaan, maka ditetapkan arah kebijakan BNN periode 2020-2024 sebagai berikut :

- a. Penanganan permasalahan narkoba secara seimbang antara *demand reduction* dan *supply reduction*.
- b. Mengembangkan berbagai upaya dalam penanganan permasalahan narkoba secara holistik, integral, dan berkelanjutan.
- c. Penanganan jaringan sindikat narkoba dilakukan hingga tindak pidana pencucian uang;
- d. Mengedepankan profesionalisme, dedikasi, dan tanggung jawab dalam penanganan permasalahan narkoba.

### ***Strategi***

Adapun strategi yang dirumuskan untuk melaksanakan kebijakan tersebut adalah melalui :

- a. Melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mengintegrasikan program pencegahan penyalahgunaan narkoba ke dalam seluruh isu dan sektor pembangunan melalui konsep penganggaran berwawasan anti narkoba, kebijakan berbasis anti narkoba, serta mendorong pembangunan karakter manusia dengan memasukkan nilai-nilai hidup sehat tanpa narkoba ke dalam kurikulum pendidikan dasar sampai lanjutan atas.
- b. Menumbuh-kembangkan kepedulian dan kemandirian masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dari tingkat desa/ kelurahan dengan mendorong relawan-relawan menjadi pelaku P4GN secara mandiri.
- c. Mengembangkan akses layanan rehabilitasi penyalah guna, korban penyalah guna, dan pecandu narkoba yang terintegrasi dan berkelanjutan, serta mengoptimalkan peran K/ L dalam pemanfaatan infrastruktur dan sumber daya K/ L.

- d. Mengungkap jaringan sindikat peredaran gelap narkoba dan menyita seluruh aset terkait kejahatan narkoba dengan menjalin kerjasama dan kemitraan yang harmonis dengan penegak hukum baik dalam maupun luar negeri khususnya dalam mengungkap jaringan peredaran gelap narkoba.
- e. Melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi *good governance* dan *clean government* di lingkungan BNN.

## **VII. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN BNNP ACEH**

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Aceh dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.

### **1. Tugas**

Badan Narkotika Nasional Provinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Aceh. Sedangkan Tugas Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2014, meliputi:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba;
- h. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor Narkotika;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba; dan
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

## **2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh menyelenggarakan fungsi:

- a) pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi;
- b) pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
- c) pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d) penyusunan rencana program dan anggaran BNNP;
- e) evaluasi dan penyusunan laporan BNNP; dan
- f) pelayanan administrasi.

## **3. Kewenangan**

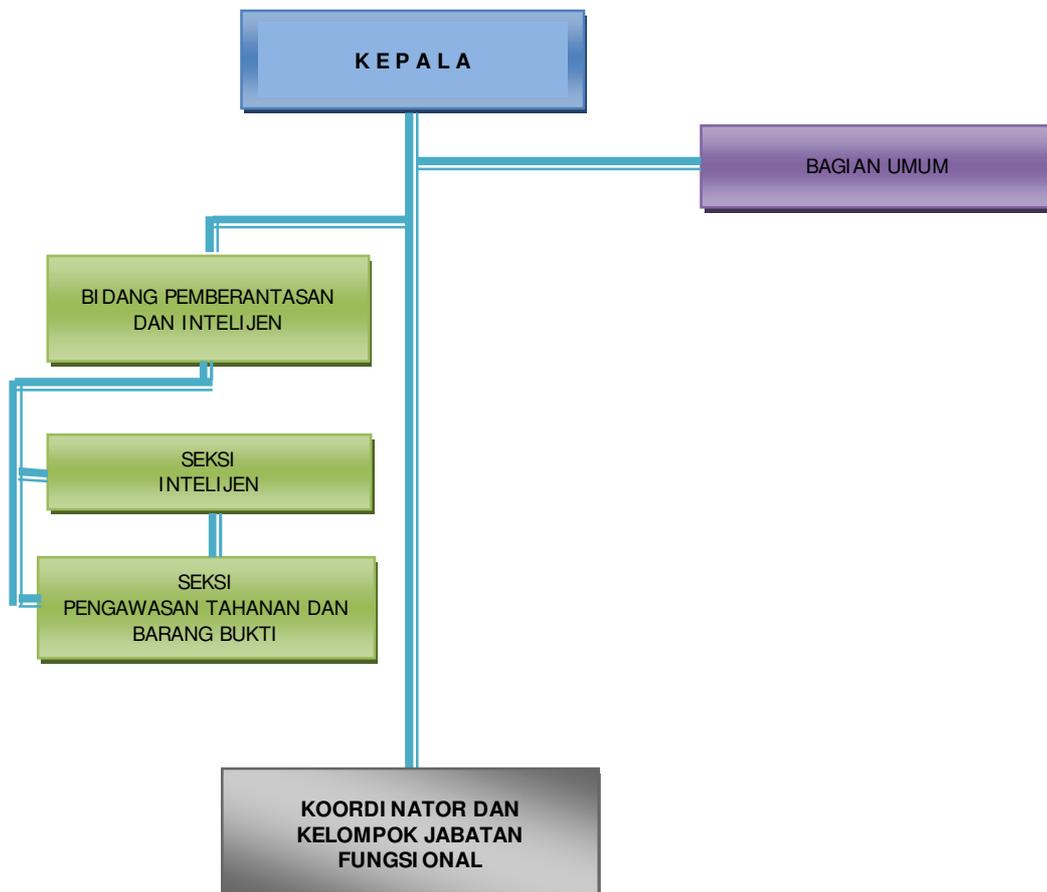
Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh pada dasarnya adalah melaksanakan kewenangan Badan Narkotika Nasional yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

## VIII. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- a) Kepala;
- b) Bagian Umum;
- c) Bidang Pemberantasan dan Intelijen
- d) Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH



## BADAN NARKOTIKA NASIONAL

### PROVINSI ACEH

---

## RENCANA KERJA TAHUNAN

SATUAN KERJA : BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH

TAHUN : 2022

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET
<b>BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			
Penyelenggaraan Advokasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	5 Keluarga
	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	2 Desa
Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat
Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	2 Lembaga
Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	1 Lembaga

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET
<b>BI DANG PEMBERANTASAN</b>			
Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Jumlah jaringan sindikat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	1 Laporan
Pengawasan Tahanan dan barang bukti	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	Pengawasan dan Pengendalian Produk	2 Produk
	Nilai Tingkat Keamanan, barang bukti narkoba dan non narkoba	Pelayanan Publik kepada Masyarakat	8 Orang
	Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	17 Orang
Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkoba	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21	Perkara hukum perseorangan	10 Perkara
	Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	Operasi Bidang Keamanan	2 Operasi

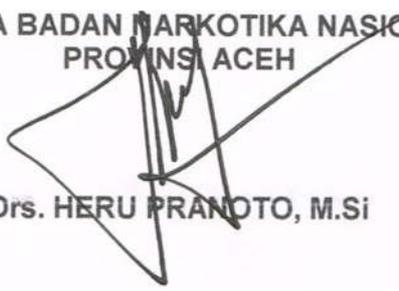
KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET
<b>BI DANG REHABILITASI</b>			
Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	Indeks mutu layanan rehabilitasi	Pemantauan dan Evaluasi serta pelaporan	1 Laporan
	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkoba		
Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Jumlah tenaga rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi	Standarisasi Profesi dan SDM	5 Orang
	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	Sertifikasi Profesi dan SDM	25 Orang
Penguatan Lembaga Rehabilitasi	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	280 Orang

Komponen Masyarakat	wilayah provinsi		
	Jumlah Unit Penyelenggaraan layanan IMB yang Operasional	Fasilitas dan pembinaan Lembaga Rehabilitasi	13 Lembaga
	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi		

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>			
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Nilai Kinerja Anggaran	Layanan Perkantoran	12 Bulan
	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen
Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Aceh	Layanan Manajemen SDM	112 Orang
	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target		
Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Nilai Kinerja Anggaran	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Aceh	Layanan Perkantoran	12 Bulan
	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	Layanan BMN	1 Layanan
		Layanan umum	1 Layanan
		Layanan Sarana dan Prasarana	4 unit

Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Aceh	Layanan Hubungan masyarakat dan informasi	1 Layanan
	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target		

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI ACEH

  
Drs. HERU PRANOTO, M.Si

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL

### PROVINSI ACEH

#### PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA

SATUAN KERJA : BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH

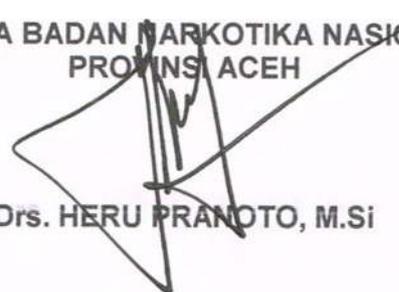
TAHUN : 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3	Kabupaten /Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	10	Kabupaten /Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	10	Kabupaten /Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	15	Kawasan
5	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2,6	Indeks

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
6	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	63	Orang
7	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	25	Orang
8	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	3	Lembaga
9	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	17	Unit
10	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Aceh	3,3	Indeks
11	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	-	
12	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	17	Berkas Perkara
13	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	2	Titik Lokasi
14	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	Indeks

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
15	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	Indeks
16	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Aceh	88	Indeks
17	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	10	BNN Kabupaten /Kota
18	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Aceh	95	Indeks
19	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	10	BNN Kabupaten / Kota

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI ACEH

  
Drs. HERU PRANOTO, M.Si